

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Dra. Hj. NURDIALIS M, M.Si

Jabatan

: KEPALA BIRO KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama

:AHMAD HERYAWAN

Jabatan

: GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA.

AHMAD HERYAWAN

Dra. HJ. NURDI**ALIS M, M.Si** Pembina Utama Muda

NIP. 19591007 198503 2 005

PIHAK KESAT

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya sistem, kebijakan dan prosedur penyusunan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif secara tepat waktu dengan memperhitungkan azas keadilan dan kepatuhan	Jumlah pengelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat yang tertata dengan baik     Prosentase Implementasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)     Tingkat Kecocokan rekonsiliasi Keuangan	4 27 Kab/Kota 1 Provinsi 49 OPD 12 Biro 100%
2.	Meningkatnya kecepatan, akurasi pelayanan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	<ol> <li>(Pendapatan Pajak Daerah)</li> <li>Prosentase SP2D diterbitkan Yang tepat waktu</li> <li>Keputusan Gubernur hasil Evaluasi P2 APBD</li> <li>PERDA APBD/APBDP Provinsi Jawa Sarat</li> <li>PERDA PERGUB P2 APBD Provinsi Jawa Barat</li> <li>Tingkat pemenuhan opini WTP dari auditor independen atas laporan</li> </ol>	100% 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
3.	Tersedianya Siklus informasi pengelolaan keuangan yang cepat, tepat sesuai untuk kebutuhan statistik pendapatan dan belanja	keuangan Provinsi Jawa Barat:  - Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat  1. Jumlah laporan pemutakhiran keuangan daerah:  - DAU  - Belanja pegawai dan fixed cost  - Rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.006.780.000,00	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 2.223.090.000,00	APBD
3	Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Rp 288.000.000,00	APBD
4	Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Rp 7.174.098.000,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp45.400.000,00	APBD
6	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Rp 2.218.070.000,00	APBD

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Bandung, Januari 2016

KEPALA BIRO KEUANGAN

Dra. Hj. NURDIALIS M, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591007 198503 2 005